

## #8

# Mendata Lampung, Menemukan Potensi

*Slamet Rahmat Topo Susilo & Habibullah*

### A. Menyibak Gerbang Pulau Sumatra: Pengantar

Badan Pusat Statistik (BPS) pada tanggal 15 Oktober–14 November 2022 melaksanakan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tahun 2022 di seluruh provinsi di Indonesia. BPS Kabupaten Lampung Selatan merupakan lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan Regsosek tahun 2022 di Kabupaten Lampung Selatan. Kabupaten Lampung Selatan merupakan pintu gerbang Pulau Sumatra, letaknya strategis sebagai pintu masuk ke Pulau Sumatra dan jalan tol melintasi sebagian besar wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Keberadaan jalan tol dan posisi strategis Kabupaten Lampung Selatan semestinya membawa kesejahteraan bagi 1.071.727 jiwa penduduknya yang tersebar di 17 kecamatan, 256 desa, dan 4 kelurahan.

---

S. R. T. Susilo,\* & Habibullah

\*Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, *e-mail*: slam024@brin.go.id

© 2023 Badan Riset dan Inovasi Nasional

Susilo, S. R. T., & Habibullah (2023). Mendata Lampung, menemukan potensi. Dalam Humaedi, M. A., Imron, D. K. & Pramono, A. (Ed.), *Mencatat untuk Membangun Negeri Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Seri 2: Indonesia Tengah-Barat* (271–304). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.777. c710 ISBN: 978-623-8052-95-0 E-ISBN: 978-623-8052-99-8

Pendataan Regsosek adalah pengumpulan data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan. Data awal mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan sebelumnya hanya diketahui melalui survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS) yang hanya terbatas kepada sampel yang terpilih. Berbagai survei tersebut menghasilkan angka atau persentase mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat baik pada kategori sangat miskin, miskin, maupun tidak miskin, tetapi tidak mampu menunjukkan siapa yang masuk kategori sangat miskin, miskin, dan tidak miskin tersebut. Berdasarkan data Kabupaten Lampung Selatan dalam angka tahun 2022 (BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2022), dari 1.071.727 jiwa penduduk Kabupaten Lampung Selatan terdapat sebanyak 145.850 jiwa penduduk miskin (14,19%). Jumlah penduduk miskin tersebut menempatkan Kabupaten Lampung Selatan pada urutan ketiga, setelah Kabupaten Lampung Timur (159.790 jiwa) dan Lampung Tengah (155.770 jiwa) pada urutan pertama dan kedua (BPS Provinsi Lampung, 2021). Kepadatan penduduk di Lampung Selatan tahun 2021 mencapai 508 jiwa/km. Kepadatan penduduk di 17 kecamatan cukup beragam, padatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Jati Agung dengan kepadatan sebesar 787 jiwa/km dan terendah di Kecamatan Rajabasa sebesar 249 jiwa/km.

Pengukuran kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan menggunakan pengukuran yang dilakukan oleh BPS secara nasional. Pengukuran tersebut menggunakan konsep kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan dan bukan makanan). Penduduk dikatakan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pengukuran kemiskinan dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan untuk memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Garis kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun sebesar Rp439.421,00 (BPS Provinsi Lampung, 2021).

## **B. Bentang Alam Tersulit dalam Pendataan Khusus**

Kabupaten Lampung Selatan (Gambar 8.1) secara geografis berada di ujung selatan Provinsi Lampung dan merupakan gerbang utama Pulau Sumatra, berbatasan dengan Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Timur. Lampung Selatan terdiri dari 17 kecamatan, 256 desa, dan 4 kelurahan. Sebanyak 4 kelurahan tersebut hanya berada di ibu kota Kabupaten Lampung Selatan, yaitu Kecamatan Kalianda.

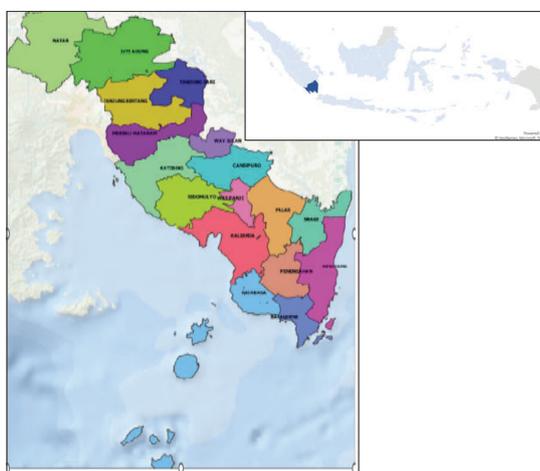
Ketinggian rata-rata di ibu kota kabupaten adalah 33 m dari permukaan laut. Sebagian besar wilayah Lampung Selatan adalah dataran, dimana jumlah desa yang berada di dataran sebanyak 238 desa, sedangkan sisanya 22 desa terletak di lereng/puncak dan di lembah. Kabupaten Lampung Selatan bagian selatan meruncing dan mempunyai teluk besar, yaitu Teluk Lampung. Di Teluk Lampung terdapat sebuah pelabuhan yaitu Pelabuhan Panjang sebagai tempat kapal-kapal dalam dan luar negeri berlabuh. Secara umum pelabuhan ini merupakan faktor yang sangat penting bagi kegiatan ekonomi penduduk Lampung sejak tahun 1982. Pelabuhan Panjang sendiri termasuk dalam wilayah Kota Bandar Lampung.

Apabila dilihat dari sisi ketinggian, wilayah Kabupaten Lampung Selatan tidak terdapat bentang alam yang sulit dijangkau untuk dilaksanakan pendataan awal Regsosek pada tahun 2022. Namun, pada saat kegiatan pendataan awal Regsosek, setidaknya ada 13 desa di 5 kecamatan terendam banjir, yakni Desa Padang Cermin, Desa Sanggi, Desa Gayau, Desa Durian, Desa Banjaran, Desa Sukamaju, Desa Sidodadi, Desa Suka, Desa Suka Banjar, Desa Sidomulyo, Desa Sidawaluyo, dan Desa Talang Baru. Banjir terjadi tanggal 27 Oktober 2022 dan menewaskan 3 orang tersebut terjadi sebelum peneliti mengunjungi Kabupaten Lampung Selatan.

Pada saat peneliti berkunjung, Menteri Sosial RI juga berkunjung menyerahkan bantuan kepada korban banjir. Banjir di Kabupaten Lampung Selatan merupakan banjir akibat luapan air Sungai Sekampung saat intensitas curah hujan tinggi, baik curah hujan di

bagian hulu sungai maupun curah hujan lokal. Terdapat beberapa faktor penyebab banjir lainnya, yaitu kemiringan lereng, tutupan lahan, dan jenis tanah. Banjir tersebut menurut beberapa Koseka di Lampung Selatan, cukup mengganggu proses pendataan awal Regsosek. PPL maupun PML yang terdampak banjir diberi peringatan oleh Koseka untuk mengamankan kuesioner agar tidak basah dan hilang.

Tantangan bentang alam adalah untuk menjangkau penduduk yang berada di beberapa pulau. Kabupaten Lampung Selatan memiliki pulau yang terletak di 4 kecamatan, yaitu kecamatan Katibung, Rajabasa, Ketapang, dan Bakauheni. Pulau terbanyak ada di Kecamatan Rajabasa, yaitu sebanyak 16 pulau. Di Kecamatan Rajabasa ada Pulau Sebesi, yaitu pulau yang terluas di Kabupaten Lampung Selatan (4.643 Ha). Ada juga Pulau Krakatau, Pulau Sebuk, Pulau Rimau dan Pulau Kandang. Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah dataran dengan ketinggian dari permukaan laut bervariasi. Daerah dataran tertinggi berada di Kecamatan Merbau Mataran dengan ketinggian



Sumber: BPS Lampung Selatan (2022)

**Gambar 8.1** Peta Kabupaten Lampung Selatan

102 m dari permukaan laut. Kalianda sebagai ibu kota kabupaten memiliki ketinggian 33 m dari permukaan laut.

Desa Tejang Pulau Sebesi merupakan desa yang mempunyai bentang alam yang sulit untuk dijangkau. Desa ini merupakan bagian Kecamatan Rajabasa, untuk menjangkaunya harus terlebih dahulu menyeberang dari Dermaga Canti ke Pulau Sebesi. Penyeberangan Dermaga Canti ke Pulau Sebesi dapat menggunakan perahu motor dengan harga 20—30 ribu rupiah per orang atau 1—2 juta rupiah per rombongan. Pulau ini merupakan daratan yang paling dekat dengan Gugusan Krakatau dan turut menjadi saksi kedahsyatan letusan besar Krakatau tahun 1883. Sejak dulu Pulau Sebesi sangat terkenal akan kesuburan tanahnya. Salah satu dorongan kuat mengapa Pulau Sebesi tetap dihuni karena tanahnya yang memang terkenal subur. Selain perikanan, warga di pulau ini juga berkebun. Kini, selain memiliki keunggulan di sektor perkebunan, pulau ini juga sedang dikembangkan sebagai tujuan wisata andalan Lampung Selatan, selain Krakatau dan sejumlah pantai, seperti Merak Belantung, Kalianda resort, dan lainnya. “Bentang alam yang sulit dijangkau adalah Desa Tejang Pulau Sebesi karena terpisah dengan daratan Sumatra pulau tersendiri,” demikian ungkap seorang Koseka Lampung Selatan.

Desa Tejang Pulau Sebesi dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Masyarakat setempat yang kebanyakan berdarah Banten biasa memanggil kepala desanya dengan sebutan *Jaro'*. Kepala desa dibantu oleh seorang sekretaris desa. Selain itu, kepala desa dibantu oleh sejumlah kepala urusan (Kaur) di sejumlah bidang, seperti pemerintahan, kependudukan, pembangunan, dan lain-lain. Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa juga dibantu oleh kepala dusun yang membawahi masing-masing dusun. Kepala dusun setingkat RW dibantu oleh ketua RT. Pelaksanaan pendataan awal Regsosek di Pulau Sebesi dilaksanakan PPL setempat dan dilaksanakan supervisi oleh Koseka dan BPS Lampung Selatan tanggal 10 November 2022 sehingga peneliti tidak berkesempatan melakukan wawancara dan observasi, yang merupakan bentang alam tersulit di Kabupaten Lampung Selatan.

Bentang alam Kabupaten Lampung Selatan mempunyai keunikan tersendiri apabila dikaitkan dengan pembagian wilayah administrasi. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten tertua di Provinsi Lampung. Beberapa wilayah Kabupaten Lampung Selatan telah dimekarkan menjadi Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pesawaran, dan Kota Bandar Lampung. Pemekaran wilayah tersebut menyebabkan beberapa kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan harus melewati wilayah Kota Bandar Lampung baru ke Kalianda sebagai ibu kota Kabupaten Lampung Selatan dan terasa jauh jaraknya dengan ibu kota kabupaten. Kecamatan Natar merupakan kecamatan yang terjauh dari ibu kota kabupaten Lampung Selatan (83 km), Kecamatan Jati Agung (74 KM), dan Tanjung Bintang (63 km).

“Kabupaten Lampung Selatan merupakan kabupaten lama dan beberapa dimekarkan menjadi Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pesawaran, dan Kota Bandar Lampung bentang alamnya dan pembagian wilayahnya unik karena harus melewati Kota Bandar Lampung dulu baru bisa ke Kecamatan Jati Agung, Natar dan Tanjung Bintang.” (Wawancara dengan responden, 2022)

Keterkaitan pembagian wilayah administrasi dengan bentang alam Kabupaten Lampung Selatan menjadi tantangan dalam pendataan awal Regsosek. Menurut Kepala BPS Lampung Selatan, penduduk Kabupaten Lampung Selatan di Kecamatan Natar, Jati Agung, dan Tanjung Bintang secara *de facto* bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, tetapi secara administrasi kependudukan, beberapa penduduk tercatat memiliki KTP dan KK Kota Bandar Lampung. Ada beberapa alasan yang menyebabkan penduduk wilayah perbatasan ini lebih memilih secara administrasi menjadi penduduk Kota Bandar Lampung. Pertama, secara jarak Kota Bandar Lampung lebih dekat dibandingkan ibu kota Kabupaten Lampung Selatan di Kota Kalianda sehingga untuk biaya transportasi proses pengurusan administrasi lebih murah dan tidak memerlukan

waktu yang lama untuk menjangkau pelayanan publik tersebut. Kedua, pelayanan publik seperti rumah sakit pemerintah, sekolah pemerintah lebih banyak tersedia di Kota Bandar Lampung sehingga jika terdaftar sebagai penduduk Kota Bandar Lampung, maka urusan administrasi lebih mudah. Ketiga, berbagai bantuan dari pemerintah lebih banyak jika sebagai penduduk Kota Bandar Lampung.

Pada pendataan awal Regsosek, petugas mengalami kesulitan dalam mendata penduduk daerah perbatasan ini. Perlu kesepakatan antar petugas maupun antara BPS Kabupaten Lampung Selatan dan BPS Kota Bandar Lampung serta antar pemerintah desa/kelurahan di 2 wilayah ini. Bentang alam bukan menjadi tantangan utama dalam pendataan awal Regsosek di Kabupaten Lampung Selatan. Namun, proses pendataan terkendala di beberapa tempat disebabkan sulitnya petugas menemukan penduduk yang didata. Pada daerah perkebunan dan pertanian pada pagi sampai sore hari pada saat jam kerja, penduduk tidak ada di rumah, akan tetapi berada di tempat kerja seperti di sawah dan kebun. Demikian juga pada penduduk bermata pencaharian nelayan, penduduk tidak dapat ditemukan pada saat sedang melakukan pendataan karena sedang berada di laut. Pada daerah penyangga Kota Bandar Lampung berupa perumahan, petugas juga mengalami kesulitan untuk ketemu penduduk pada pagi hari karena sebagian besar penduduk bekerja di sektor formal seperti pemerintahan, perusahaan swasta, maupun pabrik.

### **C. Menelisik Awal Pemahaman Proses Bisnis Regsosek**

Menurut Kepala BPS Kabupaten Lampung Selatan proses bisnis pendataan awal Regsosek dilakukan secara cepat. “Kami mulai kegiatan Regsosek setelah Pidato Presiden tanggal 16 Agustus 2022,” ungkap Kepala BPS Kabupaten Lampung Selatan. Pada tingkat BPS Kabupaten, kegiatan pendataan awal Regsosek dirasakan mulai ada kegiatan setelah Pidato Kenegaraan Presiden RI pada penyampaian RUU APBN tahun 2023 tanggal 16 Agustus 2022. Pada pidato

tersebut dinyatakan bahwa reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan basis data penerima, melalui pembangunan data Regsosek serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Penunjukan BPS sebagai pelaksana pendataan awal Regsosek tahun 2022 sangat tepat dengan berbagai alasan sebagai berikut.

- 1) BPS mempunyai lembaga dan sumber daya manusia, dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dengan Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka), hingga mitra pengumpul data lapangan sehingga ada jaminan mekanisme dan prosedur kerja untuk pendataan dapat dilakukan secara seragam.
- 2) BPS berpengalaman dalam melaksanakan sensus maupun survei rutin, seperti Sensus Penduduk, Survei Tani, Survei Sosial Ekonomi Nasional, maupun dalam Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) tahun 2005, Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2008 dan 2011.
- 3) Intervensi dari berbagai pihak agak susah dilakukan jika pendataan dilakukan BPS. BPS merupakan instansi vertikal sampai ke daerah, akan tetapi intervensi dari berbagai pihak di daerah tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.
- 4) Proses rekrutmen dan pelatihan PPL dan PML dilakukan sendiri oleh BPS Kabupaten dan PPL dan PML berasal dari daerah setempat sehingga biaya menghemat biaya operasional pada saat pengumpulan data. BPS hanya menyediakan honor dan premi iuran BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan kontrak kerja, sedangkan operasional seperti penginapan dan transportasi tidak disediakan oleh BPS karena PPL maupun PML merupakan masyarakat setempat.

Pada saat peneliti ke lokus penelitian, Regsosek sedang dilaksanakan. Proses pengumpulan data dilakukan oleh Petugas Pendataan Lapangan (PPL). PPL dalam melaksanakan tugasnya dipimpin Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML). PPL maupun PML direkrut oleh BPS berasal dari masyarakat setempat sehingga

memudahkan dalam proses pengumpulan data. PPL maupun PML sebelum melaksanakan tugas mendapatkan pelatihan terkait mekanisme dan prosedur pendataan. PPL direkrut berasal dari yang berpengalaman atau yang belum berpengalaman dalam kegiatan yang dilaksanakan BPS, sedangkan PML dapat berasal PML yang berpengalaman sebagai PML atau pernah terlibat sebagai PPL pada kegiatan BPS.

Sebelum melaksanakan tugasnya, petugas Regsosek mendapatkan pelatihan secara berjenjang. Pada saat pelatihan juga melibatkan perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lampung Selatan sebagai peserta pelatihan *sit in*. Pelibatan peserta dari OPD bertujuan untuk memberikan masukan, sekaligus meminta dukungan dalam pelaksanaan pendataan awal Regsosek tahun 2022.

Koseka merupakan unsur penting dalam pengoordinasian lapangan kegiatan pendataan awal Regsosek. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendataan awal Regsosek, BPS Kabupaten Lampung Selatan menugaskan sebanyak 32 Koseka. Dari 32 Koseka tersebut, sebanyak 22 Koseka berasal dari pegawai BPS Kabupaten Lampung Selatan dan 10 Koseka berasal dari mitra BPS. Mitra BPS yang dapat menjadi Koseka adalah mitra BPS Kabupaten Lampung Selatan yang sudah berpengalaman dalam mengikuti berbagai kegiatan sensus dan survei yang diselenggarakan oleh BPS. Koseka tersebut sudah berpengalaman menjadi PPL dan PML sehingga diharapkan Koseka ini dapat mengkoordinasikan PPL dan PML dalam pengumpulan data.

Pelaksanaan pendataan awal Regsosek masih menggunakan moda PAPI (*Paper Assisted Personal Interviewing*) atau menggunakan kertas sebagai pencatat hasil dari wawancara dengan penduduk. Penggunaan kuesioner tercetak merupakan pilihan yang terbaik dalam pendataan awal Regsosek tahun 2022 (Gambar 8.2).

Pengisian kuesioner tercetak tidak memerlukan aplikasi dan perangkat tertentu dan tidak tergantung dengan koneksi internet. Pada pendataan dengan menggunakan aplikasi dengan metode *paperless*, memang secara efisiensi pembiayaan relatif lebih murah dan lebih



Foto: Slamet (2022)

**Gambar 8.2** Pendataan Regsosek di Kabupaten Lampung Selatan

cepat dalam pengolahan data, akan tetapi pada saat pengumpulan data lapangan mengalami kendala. Menurut beberapa Koseka untuk penggunaan aplikasi dan metode *paperless*, mengalami kendala sebagai berikut.

- 1) Diperlukan perangkat pengumpul data berupa HP, tablet maupun laptop yang bisa dibawa pada saat di lapangan. BPS tidak menyediakan pembiayaan pembelian atau penyewaan perangkat pengumpul data tersebut. Apabila dibebankan kepada petugas pengumpul data, perangkat pengumpul data yang dimiliki oleh petugas mempunyai spesifikasi yang beraneka ragam dan belum tentu *compatible* dengan aplikasi yang digunakan.
- 2) Diperlukan koneksi internet ketika pengumpulan data di lapangan. Koneksi internet menjadi kendala petugas pengumpul data, yaitu harus ada paket kuota internet dan wilayah menjadi tempat pengumpulan data tersebut sudah terjangkau dengan sinyal internet yang stabil pada saat pengiriman data ke server.
- 3) Diperlukan server yang memadai untuk menerima data yang dikirim oleh pengumpul data secara bersamaan. Jika tidak didukung oleh server yang memadai, akan menghambat proses pengiriman data dan juga pengumpulan data di lapangan.

Penggunaan aplikasi dilakukan terbatas untuk *geotagging* dan foto melalui aplikasi Wilkerstat BPS. Wilkerstat digunakan sebagai petunjuk PPL dalam melaksanakan pengumpulan data. Pada aplikasi ini terdapat peta yang menunjukkan kedudukan penduduk pada GPS. Saat pendataan Regsosek, pengumpul data melakukan *geotagging* untuk semua keluarga, sedangkan pada keluarga yang termasuk keluarga sangat miskin dan miskin dilakukan pengambilan foto pada 4 sisi bagian rumah.

Penentuan keluarga sangat miskin dan miskin tersebut berdasarkan hasil konsultasi petugas dengan perangkat desa setempat atau pengurus RT dan RW. Meskipun dirasakan penentuan tersebut mungkin ada unsur subjektivitas, suka atau tidak suka oleh perangkat desa/RT/RW setempat terhadap keluarga yang dikategorikan keluarga sangat miskin, miskin, atau tidak miskin. Semestinya PPL tidak hanya mengategorikan keluarga sangat miskin, miskin dan tidak miskin hanya berasal dari informasi perangkat desa/RT/ RW setempat, akan tetapi juga melihat kondisi keluarga tersebut baik yang disampaikan melalui wawancara atau berdasarkan observasi tempat tinggal serta melihat data penerima bantuan sosial melalui <https://cekbansos.kemensos.go.id/>. Jika tidak mempertimbangkan beberapa faktor tersebut, dikhawatirkan banyak penerima bantuan sosial yang sebelumnya menerima bantuan sosial akan dikeluarkan dari hasil pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi tahun 2022.

#### **D. Antara Nilai Positif dan Tantangan dalam Mendata**

Pendataan awal Regsosek tahun 2022 merupakan pendataan pertama untuk Registrasi Sosial Ekonomi dan berbeda dengan SUSENAS. Penyiapan untuk pendataan awal Regsosek tahun 2022 dilaksanakan secara singkat. Mulai dari pelatihan, penyiapan data SLS, penyiapan logistik pengumpulan data, rekrutmen petugas, dan pengumpulan data hanya dilaksanakan secara singkat dari pertengahan Agustus

2022 sampai dengan pertengahan Oktober sudah dilaksanakan pengumpulan data. Selain itu, beda antara Regsosek dengan survei sosial ekonomi. Pada kuesioner Regsosek yang ditanyakan kepada keluarga tidak terlalu banyak dibanding dengan kuesioner pada Survei Sosial Ekonomi Nasional.

“Biasanya kami melakukan survei berbasis rumah tangga, pada Regsosek berbasis keluarga sehingga konsep tersebut harus dipahami oleh petugas.” (Wawancara dengan responden, 2022)

Pembeda lainnya konsep yang diterapkan pada Regsosek adalah keluarga. Hal ini berbeda dengan konsep survei atau pendataan yang dilakukan oleh BPS sebelumnya, yaitu menggunakan konsep rumah tangga. Pada konsep rumah tangga dalam 1 bangunan atau memiliki 1 dapur dihitung 1 kuesioner, akan tetapi pada konsep keluarga, yang menempati 1 bangunan dan 1 dapur bisa terdiri dari beberapa keluarga. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri pada pelaksanaan Regsosek.

Tantangan berikutnya adalah pada pendataan Regsosek dilakukan kepada seluruh keluarga yang menempati SLS tanpa memandang, termasuk kategori sangat miskin, miskin, dan tidak miskin. Pendataan untuk seluruh keluarga pada satu sisi memudahkan pendataan. Penduduk tidak merasa curiga ketika tetangganya didata untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah dan penduduk tersebut tidak didata, maka kemungkinan penduduk tersebut tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Dengan pendataan untuk semua keluarga tersebut tidak muncul kecurigaan/kecemburuan warga ketika pendataan awal Regsosek dilaksanakan. Namun, pendataan untuk seluruh keluarga mendapatkan tantangan untuk mendata keluarga yang tidak miskin. Beberapa keluarga pada awal pendataan menolak untuk didata karena belum mendapatkan sosialisasi, pemberitahuan dari pemerintah setempat, dan takut data yang diberikan disalahgunakan. Koseka menceritakan ada beberapa PPL mengalami kesulitan untuk melakukan pendataan pada oknum PNS kemudian PPL tersebut melapor ke PML dan Koseka. Koseka tindak

lanjut dengan pemberian sosialisasi kepada PNS tersebut bahwa pendataan awal Regsosek adalah program pemerintah dan PNS wajib menyukseskan kegiatan ini.

Pendataan awal Regsosek tahun 2022 untuk seluruh keluarga merupakan tantangan, khususnya untuk mendata keluarga yang mampu sehingga diperlukan dukungan dan sosialisasi yang masif. Di Kabupaten Lampung Selatan sosialisasi secara formal dilakukan dengan mengundang seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), camat seluruh Kabupaten Lampung Selatan, serta di-*launching* oleh Bupati Lampung Selatan. Sosialisasi juga dilakukan melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik serta berbagai media sosial yang dimiliki oleh BPS Kabupaten Lampung Selatan, seperti Facebook, Instagram, dan Tiktok. Harapannya, semua elemen masyarakat mengetahui dan mendukung pendataan awal Regsosek tahun 2022.

Pendataan awal Regsosek mendata semua penduduk yang menempati pada wilayah tertentu tanpa kecuali, penduduk yang menempati asrama, panti asuhan, dan lembaga pemasyarakatan juga dilakukan pendataan. Pendataan terhadap penduduk tersebut dinamakan pendataan wilayah khusus. Kabupaten Lampung Selatan sebagai penyangga dari ibu kota provinsi terdapat beberapa tempat yang merupakan termasuk kategori pendataan wilayah khusus seperti adanya asrama mahasiswa Institut Teknologi Sumatra (ITERA) yang ditempati ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Pendataan wilayah khusus juga dilakukan pada penduduk yang tinggal di Lapas Perempuan Kelas II A, Lapas Narkotika Way Huwi, Rutan Way Huwi, Lapas Kelas II A Kalianda. BPS Kabupaten Lampung Selatan juga melakukan pendataan malam pada tanggal 29 Oktober 2020 yang ditujukan kepada tunawisma yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Pendataan malam dilakukan pada malam hari dengan rentang waktu pada pukul 21.00—06.00 WIB. Tim Koseka, PML, dan PPL menelusuri lokasi-lokasi yang diperkirakan didiami oleh tunawisma, seperti di bawah kolong jembatan, pasar, emperan toko, dan rumah kosong.

## 1. Pandangan Pemerintah Desa terkait Kepentingan Pendataan Awal

Pemerintah Desa Pasuruan Kecamatan Penengahan sangat mendukung pelaksanaan pendataan awal Regsosek tahun 2022. Dukungan Pemerintah Desa Pasuruan, Kecamatan Penengahan terhadap pelaksanaan kegiatan BPS tidak hanya dilakukan pada kegiatan Regsosek saja, tetapi juga dukungan terhadap program Desa Cantik (Desa Cinta Statistik) di mana Desa Pasuruan merupakan salah satu Desa Cantik di Kabupaten Lampung Selatan. Tujuan umum dari Desa Cantik adalah meningkatkan literasi, kesadaran, dan peran aktif perangkat desa/kelurahan dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Tujuan berikutnya yaitu standarisasi pengelolaan data statistik untuk menjaga kualitas dan keterbandingan indikator statistik. Selanjutnya, optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan data statistik sehingga program pembangunan di desa/kelurahan tepat sasaran. Tujuan yang terakhir adalah untuk membentuk agen-agen statistik pada level desa/kelurahan.

“Kami mengembangkan Desa Cantik (Gambar 8.3). Sebenarnya kebijakan 1 kabupaten membina 1 desa cantik, tetapi kami membina 4 desa cantik yang kami anggap mampu menyajikan data statistik secara baik.” (Wawancara dengan responden, 2022)

Desa Pasuruan sudah mempunyai sistem informasi menggunakan platform OpenSID. Pelayanan publik mulai dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi serta menampilkan data dan informasi desa melalui web <https://pasuruan-lampungselatan.id/> sehingga dengan kondisi demikian ketersediaan dan keterbukaan data dan informasi desa menjadi salah satu unggulan desa ini.

Kegiatan pendataan awal Regsosek tahun 2022 sangat penting bagi pemerintah desa untuk mengetahui secara persis kondisi sosial ekonomi masyarakat desa. Meskipun Desa Pasuruan sudah memiliki data dan informasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakatnya, tetapi dengan adanya pendataan awal Regsosek diharapkan data mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakatnya lebih *update* lagi.



Sumber: Tangkapan Layar Instagram BPS Lampung Selatan (2022)

**Gambar 8.3** Pencanangan Desa Cantik di Kabupaten Lampung Selatan

Harapannya, hasil pendataan ini disampaikan kepada pemerintah Desa Pasuruan sehingga dapat melengkapi data yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Pasuruan.

Dukungan pemerintah desa terhadap pendataan awal Regsosek diantaranya melibatkan perangkat desa sebagai PPL. Pelibatan perangkat desa sebagai PPL diharapkan memudahkan komunikasi antar berbagai elemen terkait dengan Regsosek di Desa Pasuruan yaitu pihak BPS Kabupaten Lampung Selatan, pemerintah desa, dan masyarakat Desa Pasuruan.

## **E. Dukungan Kelembagaan Sosial dalam Pendataan**

Saat kunjungan ke kantor Kepala Desa Pasuruan, desa sangat mendukung pelaksanaan pendataan awal Regsosek tahun 2022.

Bahkan, kepala desa menugaskan Kepala Seksi Pelayanan, Sugeng Hariono, untuk menjadi PPL sekaligus menjadi penghubung antara BPS, lembaga desa, dan masyarakat. Penugasan Kasie Pelayanan sebagai salah satu PPL mempertimbangkan juga kompetensinya dalam hal pendataan, penguasaan teknologi, dan aspek pemahaman PPL terhadap lingkungan.

Informasi mengenai pendataan awal Regsosek didapatkan oleh pemerintah desa melalui informasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Pemerintah kabupaten dan BPS Lampung Selatan menginformasikan kepada seluruh OPD dan amat di Kabupaten Lampung Selatan melalui pertemuan Rapat Koordinasi Pendataan Awal Regsosek tahun 2022, dipimpin langsung oleh Bupati Lampung selanjutnya dan surat edaran resmi yang ditujukan kepada OPD, camat, dan kepala desa seluruh Kabupaten Lampung Selatan (Gambar 8.4).

Dari kegiatan tersebut, informasi mengenai pendataan awal Regsosek menyebar ke berbagai media yang bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan. Pemberitaan melalui media konvensional, seperti siaran TV lokal (TVRI Lampung, Saburai TV, dan Radar Lampung TV) siaran radio FM (RRI dan DBFM),



Sumber: Portal Web Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (2022)

**Gambar 8.4** Rakor Pendataan Awal Regsosek 2022

dan surat kabar lokal (Radar Lamsel dan Lampung Post). Selain itu, juga berbagai media sosial resmi dari pemerintah, baik itu melalui Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok dan Youtube. Penyebaran informasi melalui berbagai media tersebut diharapkan dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Beberapa penduduk di Desa Pasuruan, Sido Mulyo, maupun Kalianda mengaku sudah mendapatkan informasi mengenai pendataan awal Regsosek melalui berbagai media tersebut. Namun, ada juga yang sama sekali belum mengetahui pendataan ini sehingga mempertanyakan maksud dan tujuan kedatangan PPL ke rumah penduduk tersebut. Penyebaran informasi yang cukup efektif pada saat ini adalah melalui pesan berantai pada aplikasi Whatsapps. Informasi itu disebar melalui pesan pribadi maupun grup-grup Whatsapps instansi pemerintah maupun grup Whatapps Desa, RW, dan RT. Penggunaan pesan melalui Whatspps juga dilakukan untuk menyebarkan informasi mengenai pendataan awal Regsosek baik dilakukan berjenjang,, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan maupun tingkat RT/RW, serta komunitas nonformal lainnya.

Adanya penyebaran informasi dan komunikasi yang baik tentang pendataan Rrgsosek di Kabupaten Lampung Selatan menyebabkan masyarakat mendukung kegiatan pendataan ini. Bentuk dukungannya adalah memberikan informasi yang benar mengenai kondisi sosial ekonominya. Bahkan, penduduk yang didata menunjukkan dokumen-dokumen yang sebetulnya bersifat rahasia, seperti dokumen sertifikat tanah dan bangunan. Tidak ada yang ditutupi mengenai aset, harta, dan kekayaannya. Dukungan tersebut tidak terlepas dari keinginan masyarakat agar berbagai program pemerintah berdasarkan data dan informasi yang valid dan *update* sehingga tidak terjadi ketidaktepatan pelaksanaan program pemerintah. Masyarakat berharap tidak ada lagi kesalahan dalam penentuan penerima manfaat bantuan sosial dari pemerintah. Masyarakat menyampaikan bahwa masih ditemukan masyarakat yang sebenarnya layak menerima bantuan sosial, tetapi

tidak mendapat bantuan sosial. Sementara, ada juga yang tidak layak mendapat bantuan sosial, tetapi malah mendapatkan bantuan sosial.

Penjaringan informasi pada pendataan awal Regsosek menggunakan kuesioner yang ditanyakan langsung kepada penduduk yang didata. Penjaringan informasinya dilakukan secara bertingkat dimulai dengan adanya informasi awal berupa verifikasi daftar keluarga, keberadaan dan status kesejahteraan dengan ketua/pengurus SLS. Pada pendataan awal Regsosek, informasi awal dari status kesejahteraan keluarga berasal dari ketua/pengurus SLS setempat. Ketua SLS memberikan petunjuk awal untuk kategorisasi keluarga, yaitu keluarga sangat miskin, miskin, dan tidak miskin. Untuk kategori miskin dan sangat miskin nanti akan difoto pada 4 sisi rumahnya oleh PPL dan akan diberi kode status keluarga oleh PPL. Keterlibatan ketua SLS ini merupakan wujud upaya untuk memvalidasi data kepada ketua/pengurus SLS yang mengetahui kondisi sosial ekonomi warganya. Namun, pelibatan ini mengakibatkan adanya subjektivitas dari ketua/pengurus SLS dalam menentukan kategori sangat miskin, miskin, dan tidak miskin karena dalam pikiran ketua SLS yang masuk dalam kategori miskin dan sangat miskin akan mendapat bantuan sosial dari pemerintah. Jadi, validitas data Regsosek dimulai dari verifikasi data awal oleh ketua/pengurus SLS.

Setelah mengetahui kategorisasi oleh ketua/pengurus SLS, PPL akan melakukan wawancara berdasarkan kuesioner. PPL akan mengisi kuesioner berdasarkan jawaban dari penduduk yang diwawancarai serta didukung dokumen terkait seperti KTP, KK, akta kelahiran, akta pernikahan, sertifikat tanah, BPKB, buku tabungan, Kartu BPJS, dan lain-lain. Selain itu, berdasarkan jawaban penduduk dan data pendukung, PPL juga bisa mengisi kuesioner berdasarkan pengamatan seperti untuk keterangan rumah, kepemilikan usaha, kondisi kesehatan dan program perlindungan sosial, keikutsertaan program, layanan dan kepemilikan aset.

Validitas data dilakukan dengan cara pengambilan *geotagging* setiap keluarga yang diwawancarai yang menghasilkan *ID Landmark Wilkerstat*. Identitas (ID) ini harus diisi sebagai salah satu keterangan

tempat di kuesioner dan hal ini merupakan salah satu kendali untuk memastikan bahwa kuesioner diisi berdasarkan data pengumpulan data di lapangan, bukan hanya berdasarkan data pendukung, seperti KK. Setiap mengakhiri proses wawancara mengharuskan penduduk yang diwawancarai menandatangani pernyataan bahwa informasi yang diberikan adalah benar, dan boleh dipergunakan untuk keperluan pemerintah serta dilengkapi dengan nomor ponsel yang bisa dihubungi. Hal tersebut dimaksudkan untuk memvalidasi data bahwa informasi yang diberikan sudah benar dan bisa digunakan untuk kepentingan pemerintah.

Bentuk pengendalian data pada tingkat PPL juga dilakukan dengan cara setiap kuesioner yang diterima, rusak, maupun dikembalikan lagi ke BPS Lampung Selatan harus dibuatkan berita acara penerimaan kuesioner. Pada kuesioner yang sudah terisi juga harus menandatangani kuesioner dengan pernyataan telah melaksanakan pendataan sesuai dengan prosedur. Demikian juga PML menandatangani kuesioner dan menyatakan telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan prosedur (Gambar 8.5).



Foto: Slamet (2022)

**Gambar 8.5** Proses Pemeriksaan Kuesioner oleh PML

Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi pada kegiatan Regsosek memang tidak sepenuhnya dilakukan secara *paperless* yang dianggap lebih efektif dan efisien. Dalam prosesnya, masih tetap menggunakan kertas, tetapi didukung dengan teknologi komunikasi dan informasi untuk *geotagging* melalui aplikasi Wilkerstat. Penggunaan aplikasi tersebut mendukung penggunaan kuesioner yang berbasis kertas. Sangat berisiko jika hanya menggunakan aplikasi tanpa ada *back-up* kuesioner berbasis kertas untuk pendataan di seluruh wilayah Indonesia dan untuk semua keluarga di Indonesia.

#### **F. Pemuda Ponorogo Mengadu Nasib ke Lampung: Sugeng Haryono (PPL)**

Sugeng Haryono, lahir di Ponorogo. Dari kecil, hidupnya sudah penuh dengan hal-hal yang mengasyikkan. Sejak umur 5 tahun, sudah menumpang orang lain dan membantu mereka agar dapat melanjutkan sekolah. Ketika bersekolah di SMA pun sempat putus sekolah karena keadaan ekonomi yang minim sehingga menuntut untuk bekerja membantu keadaan ekonomi keluarga. Berbagai profesi telah dilakoni, dari kuli bangunan hingga pengelola perpustakaan. Hari demi hari dilalui, banyak hal yang bisa didapatkan, sebuah pengalaman yang sangat luar biasa. Kejadian demi kejadian menjadi sejarah dalam perjalanan hidup beliau.

Cerita berawal saat itu berniat untuk mencari penghidupan dan harapan hidup baru, maka berangkatlah dari Ponorogo dengan menjual motor satu-satunya untuk ongkos dan biaya hidup nanti di tanah rantauan. Apa daya Allah Swt menakdirkan berbeda. Dalam perjalanan, dari Ponorogo dengan naik bus merajut impian dalam lamunan menghanyutkan melihat pemandangan yang terpampang di depan di balik kaca jendela bus yang melaju dengan tujuan Pelabuhan Merak Banten. Uang 700 ribu rupiah di kantong (hasil penjualan motor) pun tinggal 300 ribu rupiah saat turun dari bus menginjakkan kaki di tanah Banten. Karena pengetahuan yang kurang banyak tentang kerasnya hidup di pelabuhan, bertemu dengan calo

bus jurusan Medan. Di sini ia tertipu naik mobil yang harusnya 60 ribu rupiah, tetapi dikenakan biaya ongkos sebesar 260 ribu. Sebuah pengalaman yang tidak terlupakan.

Pertama kali tiba di Lampung dia bekerja pada bengkel Pak Basuki. Saat bekerja, ia tidak dibayar. Ia hanya mendapatkan tumpang tinggal dan dapat makan gratis. Setelah itu, dia dapat ide buka tambal ban, mulai dari sini ia pun dapat uang. Dari sini ide membuat perpustakaan muncul ketika malam hari habis bekerja ingat kebiasaan dulu membaca. Setelah itu tekadnya untuk membuat perpustakaan tidak terbendung, terlebih melihat anak-anak di sekitarnya haus akan buku bacaan. Genap dua bulan setelah buka tambal ban, ia telah memiliki tabungan 500 ribu rupiah. Dengan uang tabungan itu, ia belikan Motor GL MAX tahun 1986 di tukang rongsokan, seharga 450 ribu rupiah. Saat itu, mesinnya mati dan tanpa roda depan dan belakang.

Pada bulan Maret 2014, tanggalnya sudah lupa, Motor Pustaka yang ia impikan sebelumnya, ia wujudkan dengan motor yang ia beli. Setelah diservis dengan baik, motor itu sudah bisa hidup dan bisa jalan. Bermodalkan buku-buku dari tukang rongsokan sebanyak 60 exemplar seharga 15 ribu rupiah itu, mimpi mempunyai perpustakaan sudah terwujud. Awalnya, masyarakat tidak terlalu tertarik dengan kegiatan ini, terbukti dari pertanyaan masyarakat, “Mang jualan apa? Mas jualan apa? Om jualan apa?” Pertanyaan seperti itu tidak menyurutkan semangatnya untuk terus mencoba dan menyosialisasikan bahwa ini Motor Pustaka, perpustakaan keliling dengan metode baca pinjam buku gratis. Masyarakat pun akhirnya antusias untuk membaca dan meminjam buku-buku yang dibawanya.

Setelah itu ada ide untuk meminta sumbangan buku dari rumah ke rumah. Ada sekitar dua ratusan rumah yang diketuk pintunya dan maksud dan tujuan itu pun disampaikan dengan baik. Beragam tanggapan masyarakat muncul. Ada yang mendukung, bahkan ada juga yang mencaci maki, menghina dengan kata kata yang sangat pedih, “Mas, mas ... sampean ini lho ... Mengapa mau melakukan kegiatan seperti ini? Sampean ini hidupnya masih numpang, bisa makan setiap

hari saja sudah untung, kok masih juga mau keliling nyari-nyari buku. Seharusnya sampean kerja getol tambal ban, biar hidup sampean lebih mapan” Semua itu bukan menyurutkan semangatnya, melainkan sebaliknya menambah dan menjadi pemupuk semangatnya. Dari 200-an rumah yang dikunjungi, ia pun mendapatkan 42 eksemplar buku berbagai macam judul.

Dari situ perjuangan dilanjutkan, dan pertama keliling setelah mendapatkan buku-buku hasil dari minta sumbangan itu adalah teriakan, “Buku baru... Buku baru...” Walaupun sadar, bahwa itu bukan buku baru yang baru dibeli dari toko buku atau masih terbungkus plastik. Dari sini antusiasme masyarakat naik luar biasa. Masyarakat bagaikan lapar dengan bahan-bahan bacaan. Ternyata bukan buku baru yang mereka butuhkan, tetapi semata-mata buku yang terbaru lebih tepatnya.

Pada Gambar 8.6 Presiden RI memberikan apresiasi terhadap kegiatan Motor Pustaka. Inisiator Motor Pustaka menyampaikan pengalaman perjalanan saat mengembangkan Motor Pustaka ke daerah-daerah di Lampung. Berbagai tantangan juga diceritakan.



Foto: Sugeng Haryono (2017)

**Gambar 8.6** Pak Jokowi sedang mencoba Motor Pustaka.



Foto: Sugeng Haryono (2022)

**Gambar 8.7** Aktivitas Motor Pustaka

Satu bulan rutinitas keliling dilakukan (Gambar 8.7), ternyata ada pertanyaan, “Mas, enggak ada buku buku yang baru? Bukunya *kok iki iki wae?*” Lalu mas Sugeng berpikir keras bagaimana bisa mendapatkan buku-buku baru karena ia tidak mau masyarakat kecewa. Akhirnya, keesokan hari mencoba membuka Facebook yang selama di Lampung tidak pernah membukanya. Untung masih ingat *password*-nya. Dari obrolan dengan teman-teman di Facebook itu, banyak masukan. Usulan yang paling menginspirasi itu adalah, “Mengapa tidak diambil foto dan Kamu *upload* di Facebook?”

Setelah mendapatkan foto-foto dokumentasi lalu ia unggah di warnet (warung internet). Di Lampung Selatan, khususnya tempat mas Sugeng akses internet masih begitu susah. Bahkan, karena terlalu susah, untuk unggah satu foto saja membutuhkan dua jam. Padahal penggunaan internet di warnet itu satu jamnya sebesar Rp6.000,00. Jadi setiap unggah foto harus punya uang sebesar Rp12.000,00. Akhirnya, perjuangan itu membuahkan hasil dengan adanya tanggapan dari teman Facebook setelah melihat postingan kegiatan Motor Pustaka. Medsos dalam hal ini Facebook benar-benar menjadi

wahana promosi gratis yang sangat efektif. Respon dari masyarakat pun semakin menguatkan semangatnya untuk memposting kegiatan Motor Pustaka di berbagai wilayah pelayanannya.

### **1. Aparat Desa: Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan**

Pada tahun 2019 Pak Sugeng diminta oleh Kepala Desa Pasuruan untuk menjadi aparat desa, dengan alasan bahwa Pak Sugeng memiliki ide-ide dan kreativitas yang selama ini banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ketika ditanya terkait motivasi menjadi aparat desa, secara diplomatis beliau menjawab, “Hanya ingin berkontribusi membangun desa. Saya ingin anak cucu nanti berkembang dan hidup di lingkungan yang kita harapkan. Negeri ini bukan warisan nenek moyang kita, tetapi hanya titipan dari anak cucu kita.” Semenjak menjadi aparat desa, banyak gebrakan yang dilakukan olehnya. Salah satunya adalah pengembangan *Smart Village* di Desa Pasuruan.

Program *Smart Village* atau desa cerdas merupakan perwujudan peran pemerintah provinsi dan kabupaten dalam pembinaan dan pengawasan proses pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan agar lebih baik, partisipatif, terkendali, dan akuntabel. Dalam prosesnya, ada dukungan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Selain itu, desa sebagai unit dari bagian pemerintahan dalam struktur pemerintahan di Indonesia juga memerlukan pembaruan dan adopsi terhadap perkembangan teknologi informasi sehingga dengan menerapkan teknologi informasi akan mendorong percepatan pembangunan. Apresiasi atas adopsi teknologi di desa mendapat perhatian oleh Presiden RI. Perwakilan pemerintah desa mendapat kesempatan untuk menyampaikan pengalaman pengembangan adopsi teknologi di desa kepada Presiden RI. (Gambar 8.8).

Program kerja *Smart Village* setidaknya ada tiga pokok kegiatan. Pertama, digitalisasi pelayanan publik di desa, yaitu menyelesaikan seluruh kegiatan pemerintahan desa dengan digital seperti pelayanan



Foto: Sugeng Haryono (2017)

**Gambar 8.8** PPL Diundang Pak Jokowi

surat menyurat, kependudukan, dan lainnya. Kedua, pemberdayaan ekonomi, yaitu mendorong desa atau masyarakat mampu meningkatkan melalui *e-commerce*, *marketplace*, *cashless*, dan lainnya. Ketiga, inkubasi pemerintah desa, mendukung SDM pemerintah desa dan masyarakatnya untuk dapat berperan aktif menggunakan fasilitas *Smart Village*, agar sejatinya pembangunan desa dapat tercapai, yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Program *smart village* sangat dirasakan manfaatnya oleh warga, diantaranya pengurusan surat-surat sudah berbasis IT, warga tinggal mengunduh aplikasinya, setelah itu mengisi apa keperluannya. Bahkan, ketika bertamu ke kantor kepala desa untuk mengisi buku tamu sudah menggunakan *barcode* yang tidak lagi buku manual.

## 2. Petugas Pelaksana Lapang (PPL) Regsosek

Pertama kali mendengar akan dilakukan pendataan Regsosek, Pak Sugeng langsung berdiskusi dengan kepala desa terkait adanya program tersebut (Gambar 8.9). Mereka berpendapat bahwa pendataan ini

sangat penting dan harus diintegrasikan dengan program-program desa, artinya bahwa data dari Regsosek harus sinkron dengan data desa. Seandainya seluruh PML dan PPL yang ada di desa semua terdiri dari masyarakat desa, maka desa akan sulit mengakses data tersebut dan akan bolak-balik menanyakan kepada petugas (PML dan PPL). Agar informasi tidak terputus informasi Pak Kades mengizinkan Pak Sugeng untuk menjadi PPL. Dalam ketentuan terkait rekrutmen calon petugas Regsosek, memang diutamakan *warga setempat dan seandainya aparat desa harus persetujuan atasannya*.

Persyaratan warga setempat dimaksudkan agar petugas dikenal warga sehingga memudahkan untuk berkomunikasi. Aparat desa harus seizin atasannya dimaksudkan bahwa tugas PPL sangat berat dan dibutuhkan waktu lebih kurang 2 bulan. Jangka waktu yang cukup lama ini nantinya akan mengganggu tugas sebagai sebagai aparat desa.

Pada dasarnya Pak Sugeng sangat suka dan hobi terkait hal-hal yang inovatif, IT, dan juga hal lain yang masih baru dan berguna bagi warga. Dia berkeyakinan menjadi PPL tidak jauh beda dengan dengan apa yang selama ini dia kerjakan. Hal yang menarik selama mengikuti pelatihan menjadi PPL, rasa keinginan tahunya yang sangat besar sehingga selama pelatihan, beliau yang paling banyak bertanya. Banyak hal baru yang ia ketahui terkait BPS dan pendataan sungguh merupakan ilmu baru.

Materi pelatihan yang diberikan berupa konsep yang digunakan dalam dalam Regsosek seperti informasi demografi, kepemilikan aset, bangunan tempat tinggal, dan lain sebagainya. Hal ini penting untuk menyeragamkan pemahaman para petugas terhadap konsep, defenisi, dan manajemen lapangan pendataan awal Regsosek sehingga petugas mampu memahami materi dan tata cara pengisian kuesioner pendataan lapangan dengan baik dan lancar.

Dalam pelatihan disampaikan bahwa tujuan dari pendataan awal Regsosek. Reformasi sistem perlindungan sosial diperlukan sebagai perbaikan mekanisme pelaksanaan program perlindungan sosial bagi seluruh warga negara berdasarkan kerentanan agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat waktu, mudah, akuntabel, dan responsif

terhadap kondisi bencana. Prasyarat utama dalam reformasi sistem perlindungan sosial adalah transformasi data menuju Regsosek untuk seluruh penduduk. Perubahan penyediaan data sosial ekonomi ini meliputi cakupan seluruh penduduk Indonesia, standar dan metodologi yang sama, pemutakhiran reguler, mudah diakses, dan dapat dibagi pakaikan.

Dalam pelatihan juga dikatakan bahwa data Regsosek akan menjembatani koordinasi dan berbagi pakai data lintas lembaga dan lintas daerah untuk memastikan pemakaian data yang konsisten dalam pelaksanaan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Pendataan Regsosek merupakan sistem dan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan. Data utama ini akan dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan pemerintah agar lebih terarah.

Wilayah kerja Pak Sugeng sebagai PPL di Desa Pasuruan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Desa Pasuruan berpenduduk 4.115 Jiwa/1.248 KK. Dalam satu desa terdiri dari 4 PPL, masing-masing PPL kurang lebih mendata 300 KK. Penduduk Pasuruan rata-rata sebagian besar bekerja sebagai petani, pekerja swasta, jasa, dan kerajinan, serta PNS dan TNI Polri. Di lihat dari



Foto: Olahan Peneliti (2022)

**Gambar 8.9** Pak Sugeng sebagai Petugas PPL Regsosek

suku, penduduk Desa Pasuruan rata-rata keturunan Jawa, Lampung, Padang, dan lainnya.

Bagi Pak Sugeng, pertama kali melakukan pendataan agak kesulitan/belum familier terkait *pengodean* sehingga terkadang bolak-balik dalam melihat lembar pertanyaan. Namun, setelah 2–3 hari, ia pun dapat menyesuaikan dan bisa lancar. Masyarakat rata-rata sudah tahu akan adanya pendataan Regsosek ini karena dari pihak desa sudah melakukan sosialisasi baik melalui pertemuan, rapat-rapat, grup WA, maupun dari FB, Instagram, dan juga masyarakat melihat langsung di televisi. Demikian juga ketika turun lapang, tidak banyak kendala karena mereka sudah kenal sehingga tidak ada penolakan. Sebaliknya, hal yang terasa justru setiap berkunjung ke rumah warga selalu disuguhi kopi dan juga diberikan makanan ringan dan mengobrol ke sana-ke sini. Proses pendataan seperti inilah yang membuat pendataan akan menjadi lama. Namun, keadaan ini tentu menguntungkan karena masyarakat menjadi terbuka dan tidak ada yang dirahasiakan. Masyarakat juga rata-rata sangat ingin tahu terkait pendataan Regsosek ini, apa tujuannya, dan apa pula manfaatnya. Selama ini setiap kali ada pendataan/sensus masyarakat selalu mengira akan ada bantuan sehingga menimbulkan kecemburuan bagi yang tidak didata dan juga tidak dapat bantuan.

Ada suatu pengalaman unik yang dialami Pak Sugeng dalam pendataan, yaitu ketika mendata satu keluarga yang terdiri dari ibu dan tiga anaknya. Kebetulan ketiga anaknya sakit jiwa. Waktu itu Pak Sugeng tidak berani masuk ke rumahnya takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dia berpikir keras bagaimana cara mendatanya. Dia bertanya ke tetangga sekitarnya. Atas saran tetangga, Pak Sugeng dianjurkan balik lagi besok sebelum jam 6 pagi karena pada jam tersebut ibu dari ketiga anak tersebut keluar rumah untuk membeli sayur ke pedagang sayur keliling. Pada hari selanjutnya, petugas dapat menemui ibu tersebut dan pendataan dilakukan dibawah pohon nangka di pinggir jalan. Untungnya ibu tersebut sangat baik dan tidak malu ditanya terkait kondisi anaknya.

Pengalaman unik dan juga menegangkan adalah ketika mendata salah satu warga yang memiliki usaha peternakan yang besar. Untuk menjaga keamanan ternaknya, sang warga memelihara beberapa ekor anjing. Pak Sugeng tidak sadar kalau di rumah tersebut ada peliharaan anjing. Saat itu anjingnya sudah keluar mengejar sembari menggonggong keras. Untungnya, sang pemilik anjing segera keluar dan menghentikannya. “Alhamdulillah. *Selamet, deh,*” celetuknya.

Sebenarnya banyak pengalaman menarik lainnya, tetapi setidaknya ada dua catatan penting proses pendataan Regsosek yang dilakukan para PPL dan PML. Pertama, petugas PPL dari warga di lingkungan setempat sangat membantu sekali dalam pendataan. Penerimaan warga akan petugas dan juga tingkat kepercayaan yang tinggi disebabkan karena sudah kenal. Hal ini tentu memudahkan komunikasi serta keterbukaan akan data dan informasi yang diberikan oleh masyarakat. Kedua, BPS memiliki struktur organisasi vertikal dari pusat sampai kabupaten dan juga memiliki kemitraan dengan masyarakat yang telah berpengalaman membantu kerja BPS, sehingga memudahkan mobilisasi tenaga lapang. Pendataan Regsosek yang persiapannya hanya 3 bulan tidak lepas dari bantuan para mitra di masyarakat dalam mensukseskannya.

## **G. Life Story Keluarga Fokus Data**

### **1. Eko Wahyudi**

Lahir pada bulan Oktober 1985, dan memiliki satu orang istri dengan dua orang anak. Anak pertama kelas 3 SD dan anak kedua umur 3 tahun. Rumahnya di Desa Sidorejo, Kecamatan Sido Dadi, Kabupaten Lampung Selatan. Pendidikan lulus SMA. Dulu waktu merantau ke Bandung sempat mengikuti di ITB dan diterima. Namun, karena berasal dari keluarga tidak mampu, oleh orang tuanya disarankan kerja saja. “Ngapain sekolah-sekolah, uang gak ada,” demikian jawaban bapaknya ketika menyampaikan bahwa dirinya diterima di ITB.

Desa Sidorejo sendiri merupakan desa eks permukiman transmigrasi sehingga secara etnis hampir sebagian besar merupakan

keturunan Jawa serta bermata pencarian sebagai petani. Memasuki desa ini, terlihat rumah-rumahnya tertata rapi dengan nama-nama jalan bernuansa Jawa. Demikian juga masyarakatnya, kebanyakan berbahasa Jawa sehingga memasuki desa ini seperti tidak asing lagi bagi peneliti yang merupakan orang Jawa. Dilihat dari kondisi rumahnya, Pak Eko ini kelihatan mampu, rumah sendiri tidak ngontrak, atapnya ada plafon, dindingnya bata, dan lantainya sudah pakai keramik. Apalagi, di rumahnya sudah ada TV *flat*, kulkas, dan AC.

Pengalaman kerja beliau sangat banyak, mulai dari kuli pasar, tukang batu, sampai tukang parkir. Sebelum Covid-19, ia bekerja di PT Mitra Insani dan saat pandemi, ia pun terkena PHK. Saat ini, beliau bekerja sebagai jasa kemasyarakatan seperti mengurus KTP, KK, dan surat-surat lain. Penghasilan dari jasa ini tidak menentu karena dia tidak pernah pasang tarif, cuma seikhlasnya dan kesadaran masyarakat yang sedang membutuhkannya. Apalagi jika yang meminta bantuan adalah orang yang tidak mampu, malah ia tidak akan tega meminta bayaran. Selain jasa kemasyarakatan, usaha lainnya adalah *Gado Sawah/Maron*. Artinya, dia menyewa tanah, lalu orang lain yang mengerjakan dan hasilnya akan dibagi dua. Dalam setahun, ia akan dapat panen 2 kali. Setiap panen akan dapat hasil 1,2 ton atau jika diuangkan akan mencapai jumlah sekitar 4,5 juta rupiah. Penghasilan kotor dalam setahun sekitar Rp9.000.000,00 dibagi dua, yaitu Rp4.500.000,00.

Istri memiliki usaha sendiri, yaitu jualan nasi kuning, bubur ayam, dan burger di KPK (Kampung Paguyuban Kreasi). KPK merupakan sebuah *event* yang diadakan tiap hari minggu pagi, dari jam 6–11 siang. *Event* berupa olah bersama/senam dan ajang jualan warga disertai musik yang diikuti oleh warga desa. Sebelum ada KPK, dahulu disebutnya sebagai Kampung Okey. Setelah itu, berubah lagi menjadi Paijo dan terakhir KPK. Hasil dari usaha jualan di KPK setiap hari minggu mendapatkan hasil kotor sekitar Rp900.000,00. Artinya, setiap bulan Rp3.600.000,00. Selain jualan di KPK, sang istri kadang mendapatkan order untuk acara hajatan, dan pengajian atau ulang

tahun. Namun, pesanan ini tidak menentu, kadang dalam seminggu, ia mendapatkan 3 kali, tetapi kadang juga tidak ada pesanan sama sekali.

Ketika ditanya terkait Regsosek, Pak Eko mengetahuinya dari media sosial (grup WA, Instagram, Facebook) dan juga obrolan di warung kopi. Menurut pengakuannya, dia tidak tahu sama sekali terkait pendataan Regsosek. Pengalaman yang ada, hanyalah sensus atau pendataan yang arahnya untuk mendapat bantuan. Selama ini beliau tidak memiliki BPJS, KIP, dan pada setiap ada bantuan, keluarganya juga terlewat. Satu-satunya bantuan yang ia dapat berupa bantuan sosial tunai.

Berkaitan dengan PPL dan PML yang mendata Regsosek dirasakan cukup ramah dan mampu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan secara runut dan tidak mengulang-ulang. Dari cara komunikasinya, PPL dianggap masih baru dan terkesan malu-malu ketika menanyakan hal-hal yang sifatnya pribadi. Keadaan ini dapat ditutupi dengan status PPL yang merupakan warga penduduk setempat dalam satuan lingkungan sehingga tidak ada kendala dalam penerimaan dan juga komunikasinya lancar.

Harapannya terkait pendataan Regsosek, semoga warga yang benar-benar tidak mendapat bantuan dapat diberikan haknya dan juga mendapatkan perlindungan lainnya, seperti BPJS, pendidikan, modal, dan pelatihan. Tujuannya agar mereka dapat meningkatkan ekonominya. Dalam kapasitas tertentu, para petugas pendataan (Koseka, PML, dan PPL) dianggap sedang melakukan pekerjaan yang mulia sehingga pemerintah selayaknya dapat menghargai mereka. Ia juga mengucapkan banyak terima kasih kepada aparat RT, dukuh dan kepala desa yang memberikan bantuan, khususnya saat mulai Covid-19.

## **2. Ibu Yuliani**

Kisah hidup Ibu Yuliani sangat menarik dan unik. Beliau adalah seorang ibu dari keluarga miskin yang tinggal di Perumahan Mustika

Raya II, Desa Seloretno, Kecamatan Sidodadi. Seorang ibu berusia 43 tahun dengan tiga orang anak yang masih kecil dan bersuamikan buruh di Pelabuhan Bakauheni dengan penghasilan yang tidak menentu. Sang suami jarang pulang karena sering kali ia tidak mendapatkan uang yang cukup. Kadang orang beranggapan bahwa yang tinggal di perumahan dianggapnya selalu mampu sehingga jika mereka mendapatkan bantuan, akan dianggap salah sasaran atau kurang tepat (Gambar 8.10). Bu Yuliani tinggal di perumahan atas bantuan seseorang yang merasa kasihan melihat ibu Yuliani yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan selalu berpindah-pindah tinggal di pinggir jalan.

Permasalahan menjadi rumit. Ia tinggal di perumahan, tetapi secara kependudukan ia bukanlah warga perumahan. Setiap kali ada bantuan yang mensyaratkan ber-KTP setempat, tentu keluarga Ibu Yuliani selalu tidak dapat. Sementara, bantuan yang diberikan untuk lingkungan perumahan sudah sesuai dengan KTP sehingga ketua RT atau Pak Dukuh tidak dapat menyisihkan untuk orang yang benar-benar tidak mampu dan tidak ber-KTP di lingkungan tersebut. Karena



Foto: Slamet (2022)

**Gambar 8.10** Kondisi Rumah Bu Yuliani dari Luar

beberapa kali terlewatkan bantuan, oleh perangkat desa, dukuh, dan RT kemudian dibuatkan surat domisili. Tujuannya, agar saat ada bantuan, ia akan dapat diusulkan untuk menerima bantuan itu.

Ibu Yuliani sebagai kepala keluarga (suami kerja di luar daerah) memiliki pekerjaan sebagai tukang ojek untuk mengantar anak-anak sekolah. Dia memiliki pelanggan tetap sebanyak dua orang anak sekolah. Dari kedua pelanggan tersebut, hasilnya disimpan untuk kebutuhan sekolah anaknya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dia pun mengojek di pangkalan yang hasilnya juga tidak menentu. Keadaan ini dipersulit dengan pembayaran sewa motor yang digunakannya. Demikian juga untuk memenuhi kebutuhan air, ia pun menumpang dari sumur tetangga. Di rumah yang sempit tersebut belum ada pompa air.

Ketika ditanya terkait ada pendataan Regsosek dia tidak tahu informasi sebelumnya, tiba-tiba ada petugas datang ke rumah menanyakan macam-macam (umur, jumlah anggota KK, kerjaan, penyakit, dan lain-lain). Selama ini dia merasa tidak pernah didata, mungkin karena tidak ber KTP di lingkungan dia tinggal.

Terkait PPL yang mendata, dia kenal dan orangnya baik, ramah karena petugasnya masih tetangga. Bu Yuliani sangat berharap dengan adanya pendataan Regsosek tidak akan terjadi lagi bantuan yang salah sasaran, seperti yang selama ini dia alami. Menurut Bu Yuliani, sebenarnya secara pribadi malu meminta-minta bantuan sehingga walau kadang sering terlewatkan dari bantuan dia tetap diam, dan malah orang lain yang memperjuangkan. Ucapan terima kasih kepada tetangga sekitar, RT, dukuh dan kepala desa atas perhatiannya selama ini.

## **H. Penutup**

Proses pendataan Regsosek di Kabupaten Lampung Selatan berjalan dengan baik dan lancar. Ada beberapa hal menarik untuk diperhatikan, antara lain:

- 1) Wilayah Kabupaten Lampung Selatan luas dan menyebar, baik berupa dataran rendah, perbukitan, kepulauan, perdesaan, dan wilayah perkotaan sehingga menjadi tantangan dalam pendataan Regsosek.
- 2) Pendataan Regsosek di Kabupaten Lampung Selatan berjalan lancar karena didukung oleh berbagai pihak khususnya Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
- 3) Wilayah Kabupaten Lampung Selatan berbatasan dengan Kota Bandar Lampung, masyarakat diwilayah perbatasan lebih menyukai sebagai warga Kota Bandar Lampung dibanding dengan warga Kabupaten Lampung Selatan meskipun menempati wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

## Daftar Pustaka

- BPS Kabupaten Lampung Selatan. (2022). *Kabupaten Lampung Selatan dalam angka 2022*. Diakses dari <https://lampungselatankab.bps.go.id/publication/2022/02/25/f632d36ce14cd17032812ae6/kabupaten-lampung-selatan-dalam-angka-2022.html>
- BPS Provinsi Lampung. (2021). Jumlah penduduk miskin (Ribuan jiwa), 2019–2021. Diakses dari <https://lampung.bps.go.id/indicator/23/34/1/jumlah-penduduk-miskin.html>
- Portal Web Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. (2022). Rakor pendataan awal Regsosek 2022, Pemkab Lampung Selatan dukung realisasi satu data nasional [Gambar]. <https://www.lampungselatankab.go.id>
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (2015). *Basis data terpadu 2015: Untuk memilah penerima manfaat program penanganan fakir miskin berdasarkan kriteria program*. I, 1–97.